

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang pendidikan sebagai salah satu bidang yang diklasifikasikan ke dalam pelayanan publik bentuk investasi SDM (Arinda, 2019). Pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk personel publik yang unggul (Novalia *et al.*, 2024). Pendidikan yang berkualitas memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman, kemampuan, dan keahlian yang diperlukan guna memasuki dunia kerja serta meningkatkan taraf mobilitas sosial dan ekonomi mereka (Siahaan *et al.*, 2024). Penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih produktif, yang pada akhirnya membuka peluang memperoleh penghasilan lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih layak (Suryawati dalam Zakia, 2022).

Indonesia kini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pembangunan pendidikan, di antaranya kesenjangan akses pendidikan dan masih rendahnya mutu pendidikan yang ada (Pradesa *et al.*, 2024). Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penentu utama yang turut mempengaruhi kesempatan seseorang dalam mengakses pendidikan (Fukaro, 2025). Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seringkali tidak dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka (Harahap *et al.*, 2025). Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu kerap mengalami hambatan dalam meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena ketidakmampuan dalam menanggung biaya pendidikan (Fukaro, 2025). Dengan demikian, pemerataan pendidikan yang berkualitas perlu

diwujudkan dengan memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap individu dapat mengakses pendidikan dan memiliki peluang untuk terus belajar sepanjang hayat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan amanat konstitusional yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf c turut menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi, tetapi memiliki keterbatasan secara ekonomi, sehingga kebijakan pemerataan akses pendidikan menjadi kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah tolak ukur komprehensif dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Indeks Pengetahuan merupakan salah satu unsur krusial pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Setyawan *et al.*, 2023). Partisipasi aktif generasi muda dalam menempuh pendidikan tinggi dan mengasah keterampilan tidak hanya berdampak pada pengembangan diri secara pribadi, melainkan juga memberikan kontribusi nyata terhadap dimensi pengetahuan dalam perhitungan yang menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM. Selain itu, meningkatnya kapasitas individu dapat mendukung dimensi IPM lainnya, seperti kesehatan dan taraf hidup, melalui bertambahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh (Astuti *et al.*, 2025).

Kabupaten Wonogiri adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini masih termasuk kabupaten dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif rendah (Nurhayati *et al.*, 2022). Hal ini diperkuat oleh temuan oleh Pangikat & Safitri (2025) melalui analisis biplot yang mengelompokkan Kabupaten Wonogiri ke dalam kelompok 4, yaitu kelompok kabupaten/kota yang memiliki nilai relatif di bawah kabupaten/kota lain di Jawa Tengah pada seluruh indikator pembentuk IPM, melalui umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kondisi ini memerlukan perhatian serius terhadap pembangunan kualitas instrumen insan daerah di Kabupaten Wonogiri, terutama pada aspek pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas manusia.

Tabel 1. 1 Perbandingan IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten/Kota Sewilayah Subosukawonosraten

Kab / Kota	IPM				
	2021	2022	2023	2024	2025
Boyolali	74,40	74,97	75.41	75.96	76,95
Klaten	76,12	76,95	77.59	78.16	78,68
Sukoharjo	77,13	77,94	78.65	79.30	79,90
Wonogiri	70,49	71,04	71.97	72.54	73,42
Karanganyar	75,99	76,58	77.31	78.11	78,67
Sragen	74,08	74,65	75.10	75.53	76,38
Surakarta	82,62	83,08	83.54	84.41	84,92
JAWA TENGAH	72,16	72,79	73,39	73.87	74,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

IPM Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, angka tersebut tetap menjadi yang terendah di antara kabupaten/kota dalam wilayah Subosukawonosraten dan masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri terus berkembang, laju peningkatan IPM Wonogiri masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih tepat dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian agar kesenjangan dengan daerah lain dapat dikurangi.

Dalam mengukur dimensi pengetahuan pada IPM, indikator rata-rata lama sekolah memegang peran penting. Secara teknis, komponen ini menggambarkan durasi pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020). Indikator ini diukur berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan serta tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai RLS (Rata-Rata Lama Sekolah), semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang ditempuh dan meningkatnya kualitas individu yang semakin baik dalam cara berpikir maupun tindakannya (Rahminawati, 2023).

Tabel 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2016-2025

Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Surakarta	10,90	10,92	11,00	11,25	11,26
Boyolali	7,85	8,08	8,09	8,17	8,41
Sukoharjo	9,35	9,62	9,84	10,01	10,02
Karanganyar	8,57	8,79	9,02	9,26	9,27
Wonogiri	7,34	7,42	7,67	7,68	7,85
Sragen	7,66	7,79	7,87	7,88	7,89
Klaten	8,81	9,09	9,27	9,29	9,30

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Kabupaten Wonogiri secara konsisten memiliki capaian rata-rata lama sekolah yang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2016-2025. Meskipun mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonogiri masih berada pada kisaran pendidikan dasar hingga awal pendidikan menengah pertama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Wonogiri belum menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas maupun pendidikan tinggi. BPS mencatat tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Wonogiri terbanyak lulusan SD ke bawah yakni sebanyak 299.739 orang atau 45.49%. Adapun lulusan SMP, SMA, dan SMK masing-masing 20,36%, 15,06%, dan 11,53%, sementara yang mengenyam pendidikan tinggi mulai dari diploma 1 hingga doktoral hanya 7,57% (Praditia, 2024). Hal ini dipengaruhi oleh putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masalah ekonomi dan hamil di luar nikah (Praditia, 2024). Oleh karena itu, memerlukan intervensi kebijakan yang lebih serius, khususnya dalam memperluas akses dan mendorong keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beasiswa baik tingkat pusat maupun daerah merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah daerah dalam memperluas peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan. (Dwi *et al.*, 2024). Atas dasar itu Pemkab Wonogiri menggagas program apresiasi bagi generasi muda unggulan daerah berupa dukungan dana senilai Rp12.000.000,00 per tahun, guna memperbesar keterjangkauan pendidikan tinggi, mendorong penguatan SDM, serta menekan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang kepemudaan Pasal 13 ayat (4) huruf b terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda dapat dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi.

Pada masa awal rintisannya, program ini diprioritaskan untuk mahasiswa dari kalangan prasejahtera. Pergeseran kebijakan terjadi mulai 2018 hingga kini, di mana seluruh mahasiswa asal Kabupaten Wonogiri berkesempatan meraihnya asalkan lolos tahapan seleksi sesuai standar yang berlaku (Nurhidayah *et al.*, 2023). Jika dikalkulasikan sepanjang periode 2016 sampai 2024, anggaran daerah yang dikucurkan telah menyentuh angka Rp 55 miliar demi mengakomodasi 4.394 anak muda penerima manfaat. Program ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya memperluas akses pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, mengangkat tingkat pendidikan masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan IPM di Kabupaten Wonogiri (Humas Wonogiri, 2025). Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan SDM di Wonogiri, peningkatan SDM menjadi jalan guna menurunkan angka kemiskinan. Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi Wonogiri, hasil

dari program yang sudah berjalan sejak 2016 ini baru akan terlihat secara jelas dalam beberapa tahun ke depan ketika para penerima sudah menyelesaikan kuliah dan berkarir (Praditia, 2023).

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 3 ditegaskan bahwa pemberian penghargaan bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten agar lebih kompetitif dan berkualitas dan mampu berkontribusi terhadap percepatan pembangunan di Daerah, membantu mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa kendala ekonomi yang berpotensi putus kuliah (*drop out*), memperluas kesempatan belajar, mendorong peningkatan mutu dan relevansi lulusan dari perguruan tinggi serta meminimalkan tanggungan finansial yang dipikul oleh orang tua/wali mahasiswa. Sasaran program penghargaan bagi pemuda berprestasi adalah mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga), semester 5 (lima), atau semester 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 hingga 15 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 115 Tahun 2025. Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara online menggunakan *website* pribadi oleh Simapres. Pelaksanaan mulai di tahun 2021 melibatkan mitra, yaitu peran alumni Imapres ikut serta dalam proses seleksi pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Dinas Kepemudaan, Pariwisata, dan Olahraga Kabupaten Wonogiri merupakan OPD (Organisasi Perangkat daerah) yang menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi.

Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) Wonogiri merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang terbagi menjadi 30 kelompok pengembangan dan tersebar di 25 kecamatan se-Kabupaten Wonogiri agar kontribusi imapres kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri merata di setiap desa. Imapres berperan sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), salah satunya melalui pembentukan kelompok pengembangan di setiap desa yang berkontribusi pada terwujudnya SDGs Pendidikan Berkualitas, para mahasiswa mengambil peran sebagai pendidik dengan menyebarkan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa memanfaatkan ilmu serta kecakapan yang didapatkan sepanjang menjalani studi di jenjang pendidikan tinggi untuk turut berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah. (Nurkhasanah *et al.*, 2024). Para penerima beasiswa diminta memiliki sensitivitas sosial dalam merespon situasi sosial. Mahasiswa dituntut bersikap inklusif dan tidak individualistik. Pemerintah Kabupaten Wonogiri meminta para mahasiswa dapat berkontribusi kepada masyarakat sesuai program studi yang dipelajari sehingga akan terjadi transformasi intelektual secara kolektif dan peningkatan strata sosial (Praditia, 2022). Penerima program yang tidak aktif berkontribusi pada sosial tidak akan menerima lagi program tersebut di masa mendatang. Sebaliknya, Pemkab berkomitmen akan menaikkan anggaran program menjadi Rp10 miliar jika para mahasiswa berprestasi benar-benar bisa berkontribusi, mengaktualisasikan, dan mengabdikan kepada masyarakat (Praditia, 2022).

Inovasi bagi pemerintah daerah menjadi keharusan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat serta daerahnya (Prasojo *et al.*, 2004). The United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) mengartikan *best practices* dalam konteks kehidupan perkotaan sebagai suatu inisiatif yang telah berhasil memberikan kontribusi luar biasa dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan, baik di lingkungan perkotaan maupun di tengah masyarakat pada umumnya (Hasan *et al.*, 2013). *Best practices* sebagai sebuah instrumen diperkenalkan dan digunakan oleh United Nations sebagai sarana untuk membenahan kualitas kebijakan publik berdasarkan kondisi nyata di lapangan, menumbuhkan kepedulian para pengambil keputusan dan masyarakat luas terhadap solusi atas permasalahan bersama di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mendorong upaya transfer pengetahuan, keahlian, dan pengalaman melalui jaringan kerja sama dan pembelajaran berantai (*peer to peer learning*) (Prasojo *et al.*, 2004).

Tabel 1. 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Menamatkan Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2024

Tahun	Persentase
2021	5,25
2022	4,32
2023	5,67
2024	5,80
2025	7,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2024)

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan perguruan tinggi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021-2025 menunjukkan perkembangan

yang cenderung meningkat. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 5,25 persen pada tahun 2021 menjadi 4,32 persen pada tahun 2022, persentase tersebut kembali meningkat menjadi 5,67 persen pada tahun 2023, 5,80 persen pada tahun 2024, dan meningkat secara signifikan hingga mencapai 7,27 persen pada tahun 2025. Adanya kecenderungan peningkatan pada tiga tahun terakhir mengindikasikan terbukanya peluang partisipasi pendidikan tinggi melalui kebijakan Program Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi yang mampu mendorong motivasi serta memberikan dukungan bagi masyarakat, khususnya kaum muda untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Haryanto mengungkapkan bahwa program beasiswa ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam mendongkrak kualitas daya penduduk di Wonogiri (Praditia, 2025). Program beasiswa mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri memberikan pengaruh positif terhadap IPM Wonogiri karena masyarakat tidak lagi terbebani oleh biaya pendidikan sehingga berpotensi mendorong peningkatan kualitas SDM sekaligus menekan angka kemiskinan. (Nurhayati *et al.*, 2022). Penerima beasiswa mapres terbukti mampu menempatkan diri sebagai mitra pemerintah desa dengan turut serta mendampingi pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Prasetyani *et al.*, 2021). Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dan pembangunan desa, antara lain digitalisasi UMKM lokal di Kecamatan Giriwoyo melalui pembuatan *webiste* UMKM untuk memperluas

jangkauan promosi dan meningkatkan daya saing usaha, strategi digitalisasi dan *branding* pariwisata berbasis *website* dan media sosial di Kecamatan Slogohimo pada objek wisata Puncak Semar dan Gedong Khasanah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pendampingan program di Kecamatan Girimarto berupa sosialisasi pencegahan kenakalan remaja, edukasi beasiswa bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), pelatihan keterampilan generasi muda, workshop budidaya hidroponik untuk ketahanan pangan, dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa (PORDES) yang dirangkai dengan pembagian bibit pohon alpukat sebagai upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, Kelompok Pengembangan Giriwono berfokus pada optimalisasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Selain kegiatan tersebut, masih terdapat berbagai bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh kelompok pengembangan mahasiswa penerima beasiswa mapres yang dicocokkan dengan keperluan serta keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah, sehingga secara keseluruhan mencerminkan peran aktif mahasiswa dalam mendukung pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri memiliki karakteristik yang membedakannya dengan program serupa di daerah lain. Selain memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan pendidikan, program ini juga menekankan kontribusi sosial penerima penghargaan melalui mekanisme seleksi peserta lanjutan yang mensyaratkan surat kontribusi dan

keaktifan serta memberikan bobot penilaian terhadap aspek kontribusi, kolaborasi, dan keaktifan sebesar 50% dari total penilaian.

Program ini mempunyai suatu sistem berbasis web yang disebut Simapres (Sistem Seleksi Mahasiswa Berprestasi) yang diluncurkan pada bulan November 2021 (Alfaprasetyan *et al.*, 2025). Simapres digunakan untuk melakukan penjarangan dan pendataan mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Sistem berbasis web ini awalnya dikembangkan karena jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahun dan cara konvensional dirasa kurang baik untuk digunakan mengorganisir Program Pemberian Penghargaan, terlebih ketika pandemi Covid-19 yang menuntut seluruh proses seleksi dilakukan secara daring (Alfaprasetyan *et al.*, 2025). Atas keberhasilannya dalam pengelolaan program, inovasi berbasis *website* tersebut memperoleh pengakuan nasional melalui *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Program Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri memperoleh perhatian dari berbagai pemerintah daerah. Perhatian tersebut diwujudkan melalui kunjungan beberapa pemerintah daerah ke Kabupaten Wonogiri untuk mempelajari praktik penyelenggaraan program sebagai bahan pembelajaran dalam pengembangan kebijakan sejenis (Aga, 2018). Adapun data kegiatan studi tiru ke Kabupaten Wonogiri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4 Data Kegiatan Studi Tiru Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri

Nama Instansi	Jenis Kegiatan
Disporapar Kota Magelang	Kunjungan Studi Program Beasiswa Mapres Wonogiri
Bappeda Kabupaten Klaten	Kunjungan Studi Program Beasiswa Mapres Wonogiri
Disbudporapar Kabupaten Klaten	Studi tiru Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
Disporabudpar Kabupaten Grobogan	Kunjungan Studi Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri
Disporapar Kabupaten Blora	Studi Tiru Disporabudpar Kabupaten Blora ke Disporapar Kabupaten Wonogiri
Disporapar Kabupaten Sukoharjo	Studi Tiru Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri
Disparpora Kabupaten Magelang	Studi Komparasi Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi

Sumber: Disporapar Kabupaten Wonogiri

Menilik latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri yang dimuat dalam penelitian dengan judul ”**Analisis *Best Practice* Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri**”

1.2 Rumusan Masalah

Menilik latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri ditinjau dengan aspek *best practice*?

2. Apa saja faktor pendukung keberhasilan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri ditinjau dengan aspek *best practice*?
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif teoritis mengenai praktik program yang menghasilkan nilai tambah melalui keterlibatan penerima manfaat dan dampak sosial yang berkelanjutan. Selain itu, diharapkan juga dapat memperluas pemahaman konseptual mengenai *best practice* sebagai pendekatan analisis yang menekankan proses, capaian praktik, serta pembelajaran kebijakan dalam pengembangan pelayanan publik di tingkat daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Telaah ini dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan strategi penguatan program agar praktik baik yang telah berjalan dapat dipertahankan dan direplikasi. Selain itu, penelitian ini dapat

juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam merancang program penghargaan pemuda yang tidak semata-mata berfokus pada pemberian insentif, melainkan juga mendorong kontribusi nyata penerima program kepada masyarakat.

1.5 Kajian Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Artikel	Tujuan	Metode	Hasil dan Diskusi	Perbedaan
1.	Erison <i>et al.</i> (2024) Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis) Bagi Mahasiswa di Kabupaten Lamongan	Mencapai keberhasilan implementasi program beasiswa berkualitas dan gratis (PERINTIS) bagi siswa kurang mampu dan berprestasi di Kabupaten Lamongan	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implementasi program beasiswa PERINTIS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat dikatakan cukup efektif berdasarkan kriteria Edward III, memberikan manfaat bagi masyarakat maupun organisasi, dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Meski demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya keterbatasan waktu seleksi dalam menentukan kelayakan penerima beasiswa serta terbatasnya jumlah dan	Penelitian ini berfokus pada implementasi program Beasiswa Perintis Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis <i>best practice</i> Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri dengan menitikberatkan pada praktik baik, kontribusi penerima, dan pembelajaran kebijakan.

				waktu yang dimiliki oleh tim survei.	
2.	Nurhidayah <i>et al.</i> (2023) Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi (Perbup No. 41 Tahun 2022)	Menggambarkan jaringan aktor yang terbentuk dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Jaringan aktor dalam implementasi kebijakan ini membentuk model Pentahelix yang melibatkan lima aktor, yakni pemerintah (Disporapar, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan OPD), swasta (PT Azmedia), Imapres Wonogiri, media (Radio Giri Swara, Solopos, dan website resmi Pemkab Wonogiri), serta masyarakat. Hubungan komunikasi dan koordinasi yang melibatkan aktor Imapres Wonogiri masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan.	Penelitian ini berfokus pada analisis jejaring aktor dalam pelaksanaan program untuk melihat peran, relasi, dan koordinasi antar aktor. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada analisis <i>best practice</i> Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri dengan menitikberatkan praktik baik, kontribusi nyata penerima kepada masyarakat, serta pembelajaran kebijakan.
3.	Nurhayati & Yuliani (2022) Peran Aktor Kebijakan dalam Implementasi Program Beasiswa	Memahami keterlibatan aktor kebijakan melalui teori peran yang dikemukakan	Kualitatif deskriptif	Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten	Penelitian pada artikel jurnal ini berfokus pada analisis peran dan hubungan antar aktor berbasis teori peran dalam pelaksanaan

	Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020	implementasi Eden & Ackerman yang terdiri setters, subject, dan crowd.		Wonogiri memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, meliputi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Imapres, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta penerima beasiswa yang bersifat pasif. Kendala utama dalam pelaksanaan program adalah kurangnya partisipasi aktif penerima beasiswa dalam mengikuti kegiatan yang ada di Imapres.	Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian saya mengkaji Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri sebagai <i>best practice</i> yang menonjolkan keberhasilan praktik, keterlibatan penerima, dan pembelajaran kebijakan.
4.	Della <i>et al.</i> (2025) <i>Best Practice</i> Inovasi Pelayanan Publik Kembalikan Upayakan Dukungan Untuk Sekolah (Kudu Sekolah) dalam Menangani Anak Tidak	Mengkaji penyelenggaraan inovasi KUDU Sekolah sebagai bentuk pelayanan publik di Kabupateb Pekalongan dengan	Kualitatif deskriptif	Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah telah memenuhi seluruh kriteria <i>best practice</i> . Keberhasilan program didukung oleh tersedianya alokasi dana dan fasilitas pendukung	Penelitian dalam artikel jurnal ini mengkaji Program KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan sebagai praktik pelayanan publik dalam penanganan anak tidak sekolah, sedangkan penelitian peneliti mengkaji

	Sekolah di Kabupaten Pekalongan	perspektif <i>best practice</i> serta mengidentifikasi kondisi yang mendukung dan kendala yang muncul selama pelaksanaan.		yang mencukupi. Selain itu, penggunaan aplikasi yang dapat diakses melalui <i>website</i> maupun <i>android</i> membantu proses pendataan, monitoring, dan evaluasi tanpa ketergantungan pada jaringan internet. Dukungan lainnya terlihat dari mekanisme pelaksanaan yang sederhana dan adanya pendekatan langsung dengan mengunjungi tempat tinggal Anak Tidak Sekolah (ATS). Sementara itu, kendala yang dihadapi berasal dari sebagian anggota Tim KUDU Sekolah di tingkat desa yang masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi serta belum menunjukkan tingkat kedisiplinan yang optimal.	Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Perbedaan penelitian terletak pada konteks program dan bentuk praktik pelayanan publik yang dianalisis.
--	---------------------------------	---	--	---	---

5.	Yassin <i>et al.</i> (2025) Persepsi dan Harapan Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Era Kepemimpinan Eri Cahyadi	Menelaah pandangan mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Pemuda Tangguh, mengidentifikasi berbagai kendala yang mereka alami selama tahapan seleksi maupun pelaksanaan program, serta mengkaji masukan yang diberikan untuk perbaikan dan keberlanjutan program pada periode berikutnya.	Kualitatif dengan wawancara semi terstruktur kepada mahasiswa koordinator penerima beasiswa	Program ini terbukti mampu meringankan beban finansial mahasiswa sekaligus meningkatkan motivasi mereka sebagaimana dianalisis melalui teori harapan Vroom. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, di antaranya kurangnya transparansi seleksi, terbatasnya cakupan penerima, minimnya dukungan non-finansial, serta perlunya peningkatan pada aspek ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi penerima beasiswa.	Penelitian dalam artikel jurnal berfokus pada persepsi dan harapan mahasiswa penerima Program Beasiswa Pemuda Tangguh terhadap pelaksanaan program, sedangkan penelitian saya membahas Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri sebagai praktik pelayanan publik yang dianalisis dari sisi tata kelola dan praktik pelaksanaannya.
6.	Pracheta & Wenggi (2025) Efektivitas Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Pemerintah Daerah	Mengkaji keberhasilan program dalam memperbesar peluang masyarakat memperoleh	Pendekatan deskriptif dengan metode deskriptif	Keberhasilan program beasiswa ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi dan kontribusinya dalam	Penelitian dalam artikel jurnal ini berfokus pada efektivitas program beasiswa dari sisi capaian tujuan dan manfaat bagi penerima, sedangkan

	Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	pendidikan tinggi sekaligus menghasilkan saran perbaikan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai hambatan implementasi.		mendukung IPM. Namun, program masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah daerah serta belum maksimalnya sinergi antar lembaga yang turut memengaruhi keberlangsungan program.	penelitian saya berfokus pada analisis <i>best practice</i> Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri dengan penekanan pada praktik pelaksanaan program serta faktor pendukung.
7.	Rustianti <i>et al.</i> (2023) Optimalisasi Pemanfaatan Dana Hibah Program Basiswa DPRD Kabupaten Sumbawa untuk Pengembangan SDM Daerah	Menganalisis serta menguraikan tata kelola dana hibah yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia daerah, faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan dana hibah DPRD dalam mendukung tujuan, langkah-langkah dapat dilakukan agar pemanfaatan	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan dana hibah beasiswa DPRD Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kendati demikian, masih terdapat kendala berupa mispersepsi masyarakat terhadap konsep dan	Penelitian dalam artikel jurnal ini berfokus pada pengelolaan dana hibah DPRD dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kabupaten Sumbawa, sedangkan penelitian saya berfokus pada menelaah <i>best practice</i> pelaksanaan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri sebagai pelayanan publik.

		dana hibah dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah dapat berjalan lebih maksimal.		implementasinya. Peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa ini dilakukan melalui sinkronisasi yang intensif antara anggota dan pimpinan DPRD dengan kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah pemilihan.	
8.	Sari & Rupiarsieh (2023) Analisis Kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro	Mengidentifikasi proses kebijakan dalam Program Sepuluh Sarjana Per Desa menghasilkan dampak dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro.	Kualitatif deskriptif	Program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya terbebas dari berbagai hambatan, kebijakan tersebut mampu mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro dari tingkat sedang menjadi tingkat tinggi.	Penelitian dalam artikel jurnal ini menekankan kajian pada pelaksanaan dan kendala implementasi program beasiswa, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis <i>best practice</i> Program Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi dengan menekankan pada praktik penyelenggaraan program yang direplikasi oleh beberapa daerah lain.

9.	Rahmawati & Adi (2024) Implementasi Program Beasiswa Genius S1 dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Tingkat Sarjana di Kabupaten Bojonegoro	Menelaah penyelenggaraan Program Beasiswa Genius S1 dalam mendukung pemerataan kesempatan menempuh pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro.	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan program Beasiswa Genius S1 sudah baik. Pelaksanaan program Beasiswa Genius S1 sudah sesuai dengan SK dan SOP. Program Beasiswa Genius S1 diimplementasikan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan proses seleksi administrasi, wawancara, tes skill dan survey lapangan sehingga dapat tepat sasaran.	Penelitian dalam artikel jurnal ini berfokus pada implementasi program beasiswa sebagai upaya pemerataan akses pendidikan tinggi, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis <i>best practice</i> Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri dengan menelaah praktik penyelenggaraan program yang dinilai berhasil dan memiliki nilai pembelajaran bagi daerah lain.
10.	Anggraini <i>et al</i> (2024) Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang	Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, dan mengidentifikasi faktor-faktor	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi belum menunjukkan hasil yang optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan dukungan anggaran,	Penelitian dalam artikel jurnal ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan menekankan faktor-faktor penghambat implementasi, sedangkan penelitian saya berfokus pada <i>best practice</i> Program Pemberian

		pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Rembang		pengelolaan waktu yang belum berjalan secara efektif, serta kondisi perekonomian sekitar yang berisiko menghambat pencapaian target pendapatan daerah.	Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dengan menelaah praktik baik penyelenggaraan program yang direplikasi oleh berbagai daerah.
11.	Okvianti <i>et al</i> (2024) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Melalui Beasiswa Karawang Cerdas	Mengetahui manajemen strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukaluyu dalam melaksanakan Program Beasiswa Cerdas Karawang yang dimulai pada tahun 2019.	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Beasiswa Cerdas Karawang didasarkan pada teori manajemen strategis Fred R. David, yaitu 1) perumusan strategi; program memiliki tujuan yang jelas dan dasar hukum, 2) implementasi strategi; mengoptimalkan penyebaran informasi dengan menerapkan sosialisasi aktif, 3) evaluasi strategi;	Penelitian dalam artikel jurnal ini berfokus pada strategi pemerintah daerah sebagai aktor kebijakan dalam mengelola Program Beasiswa Karawang Cerdas melalui pendekatan manajemen strategis, sedangkan penelitian saya berfokus pada <i>best practice</i> Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri dengan menganalisis praktik pelaksanaan program sebagai pelayanan publik serta faktor-faktornya.

				Implementasi sistem web baru, evaluasi strategi promosi, pengecekan ulang data calon penerima.	
--	--	--	--	--	--

1.5.2 Administrasi Publik

Secara prinsip, administrasi publik berfokus pada studi dan tata kelola pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan negara. Bidang ini menjangkau seluruh aktivitas institusi birokrasi demi menyediakan layanan masyarakat sekaligus menyukseskan target sosial-ekonomi. Nadjib (2024) menggarisbawahi bahwa disiplin ilmu ini membedah teori dan aplikasi pengorganisasian lembaga struktural, pola relasi antara penguasa dengan warga, hingga sistem operasional kebijakan. Sementara itu, Chandler dan Piano mendefinisikannya sebagai rangkaian pengumpulan serta penyalarsan aset maupun aparatur negara guna merumuskan, mengawal, dan mengevaluasi setiap keputusan publik. Kedua tokoh tersebut juga memandang rumpun ini sebagai perpaduan seni dan sains yang diarahkan untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Pada akhirnya, orientasi utamanya adalah memecahkan problem sosial lewat pembenahan aspek internal, khususnya manajemen keuangan, kapasitas sumber daya manusia, dan restrukturisasi organisasi.

Secara fundamental, rumpun keilmuan ini membedah aspirasi rakyat yang . Cakupan studinya menyentuh segala tindakan otoritas publik beserta formulasinya dalam menjawab kebutuhan massa tersebut (Dimock dalam Rodiyah et al., 2021). Selaras dengan hal itu, Joko Sutanto(2020) menggarisbawahi krusialnya fungsi tata kelola pemerintahan dalam merajut tatanan sosial yang adil dan sejahtera lewat efisiensi pelayanan masyarakat (Nadjib,2024). Sementara itu, Nicholas Henry (2013) menitikberatkan definisinya pada seluruh aktivitas yang bertalian dengan

eksekusi kebijakan negara, baik di tataran pusat ataupun daerah. Melalui sudut pandang tersebut, terlihat jelas bahwa manajemen sektor publik bertindak sebagai instrumen vital untuk mentransformasikan regulasi menjadi langkah konkret yang berdampak langsung bagi warga. Tanpa adanya instrumen ini, setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah dipastikan gagal membuahkan hasil yang dicita-citakan. dititipkan kepada pemerintah sekaligus strategi untuk merealisasinya, apabila tidak ada administrasi publik yang efektif (Wirata *et al.*, 2024).

Marc Holzer & Richard W. Schwester memandang administrasi publik sebagai proses dan pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik merupakan perpaduan antara pendekatan strategis dan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan, serta pengendalian. Akuntabilitas yang demokratis digunakan untuk menerapkan pendekatan strategi manajerial bersumber atau diadaptasi dari beberapa bidang yang relevan, yang diterapkan melalui kerangka akuntabilitas yang demokratis. Pemerintah secara formal menyusun dan melaksanakan kebijakan yang kemudian diperluas di sektor nirlaba dan sektor komunitas non-profit dan profit (Suaib, 2022).

Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya dimaknai sebagai serangkaian kegiatan administratif dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang tanggap terhadap kebutuhan serta berfokus pada berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang diarahkan pada pemenuhan kepentingan

masyarakat dan peningkatan kualitas instrumen insani daerah. Cara pandang terhadap administrasi publik tersebut berkembang seiring perubahan konteks sosial, politik, dan tuntutan masyarakat sehingga melahirkan berbagai paradigma administrasi publik sebagai kerangka konseptual untuk memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Terdapat enam dimensi paradigma dalam administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Ikeanyibe *et al.*, 2017), sebagai berikut:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik Administrasi, 1900-1926

Paradigma Dikotomi Politik–Administrasi berangkat dari asumsi bahwa pemisahan antara ranah politik dan fungsi manajemen administrasi merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi. Wilson, salah satu pelopor paradigma ini, menekankan perlunya memisahkan fungsi politik dan administrasi dalam pemerintahan. Sudut pandang ini menyatakan bahwa aktivitas politik harus dikonsentrasikan pada perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis, sementara administrasi publik harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan profesional.

Dualisme politik dan administrasi dalam Administrasi publik berkembang secara signifikan. Pembagian yang kaku antara politik dan administrasi tidak selalu dapat dilakukan karena kebijakan publik terkadang menggabungkan isu-isu politik dan administrasi yang rumit dan sulit untuk dipisahkan. Selain itu, sudut pandang ini dapat meremehkan pentingnya kerja

sama dan interaksi antara birokrat dan politisi dalam mencapai tujuan politik. Meskipun demikian, paradigma ini tetap penting untuk memahami dinamika administrasi publik di awal abad ke-20.

2. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937

Paradigma kedua adalah model birokrasi neoklasik. Keputusan yang diambil oleh birokrasi pemerintah merupakan fokus dari paradigma ini, dan proses pengambilan keputusan dengan konsentrasi pada penggunaan ilmu manajemen, analisis sistem, ilmu perilaku, dan riset operasi secara khusus merupakan elemen utama dari paradigma ini.

Ada keyakinan bahwa prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan pada pemerintahan tertentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Prinsip-prinsip ini bersifat ilmiah dan dapat diterapkan pada pelayanan administrasi di sektor, budaya, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka kelembagaan apapun. Puncak dari langkah ini adalah identifikasi tujuh prinsip administrasi Gulick dan Urwick (1937): perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan anggaran (POSDCORB) merupakan klimaks dari tahap ini (Basheka, dalam Ikeanybe, 2017).

3. Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, 1950-1970

Periode ini dapat digambarkan sebagai era pengempisan dikotomi dan penghancuran prinsip-prinsip. Politik dan administrasi saling terkait erat dalam dunia pemerintahan yang sebenarnya, maka dikotomi politik-administrasi tidak dapat disangkal. Pada tahun 1930-an, definisi politik

menurut Basheka yang pada mulanya berarti partai dan politik korup diperluas hingga mencakup perumusan kebijakan publik. Kini jelas bahwa dikotomi ini tidak bisa dijalankan (Basheka dalam Ikeanybe, 2017).

Selama tahap evolusinya, administrasi publik hanya digambarkan sebagai fokus atau “*area of interest*” atau bahkan sebagai sinonim dari ilmu politik (Landau, 1962). Meskipun strategi ini masih memberikan penekanan yang kuat pada birokrasi, hal ini pasti akan mengakibatkan birokratisasi yang berlebihan dan perluasan administrasi publik ke hampir semua bidang pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, pelayanan, dan perekonomian.

4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen, 1956 – 1970

Partisipasi pada pengambilan keputusan, keterbukaan, hubungan interpersonal, meminimalkan perbedaan dan status, kepuasan pribadi, dan memaksimalkan tingkat kepuasan adalah beberapa prinsip dasar paradigma ini. Paradigma keempat ini hampir bersamaan dengan paradigma ketiga yang menunjukkan bahwa paradigma ini bukanlah kemenangan yang saling menguntungkan bagi ilmu politik karena beberapa cendekiawan memperkuat pandangan manajemen administrasi publik. Akibatnya, pada paradigma ketiga dan keempat bersaing untuk mendapatkan jiwa administrasi publik hampir tidak meninggalkan tempat dan fokus bagi ilmu dan bidang studi yang baru diakui yang dibahas oleh para cendekiawan pelopor. Namun demikian, disiplin ilmu ini mampu menahan serangan ini, sebagaimana dicatat oleh Henry (1975), karena paradigma berikut ini

disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik atau Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik (dari tahun 1970 hingga 1990).

5. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, 1970-sekarang (NPM)

Pada titik ini dilakukan upaya untuk mengembalikan disiplin ilmu tersebut sebagai disiplin akademik yang berdiri sendiri. Dalam paradigma ini, birokrasi hirarkis dialihkan ke sektor swasta dan pasar. Dengan kata lain, paradigma NPM menggantikan model administrasi publik konvensional dan tradisional. Fokus pada peran penting keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri khas paradigma ini. Selain dipandang sebagai organisasi birokrasi, administrasi publik memainkan peran penting dalam memajukan akuntabilitas, keterbukaan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. NPM berasal dari penggabungan teori ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. Pada administrasi publik tradisional, pemerintah dipandang sebagai satu-satunya aktor otonom yang menjalankan fungsi pelayanan publik melalui struktur birokrasi yang hierarkis, sedangkan NPM merupakan paradigma yang menggeser peran tersebut ke arah pemanfaatan sektor swasta.

Menurut Farazmand (2002), administrasi publik pada masa ini menekankan pembangunan institusi, birokratisasi, nasionalisasi erta penguatan kapasitas organisasi dan administrasi demi mendukung

pembangunan ekonomi dan nasional. Pergeseran ini berasal dari paradigma Administrasi Publik Konvensional yang kemudian berkembang menuju pendekatan tata kelola. Bahkan, ia juga berpendapat bahwa banyak praktisi cenderung memasukkan paradigma Tata Kelola sebagai bagian dari NPM (Peters, 2003)

6. Paradigma 6: Governance, 1990-sekarang

Manajemen merupakan tujuan utama pemerintahan dan administrasi publik. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan pemerintah atau sebagai sinonim dari kata pemerintah. Penerapan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kepentingan masyarakat dikenal sebagai pemerintahan. Hal ini merupakan sebuah proses yang rumit dimana kekuasaan dipegang berbagai aspek masyarakat kekuasaan dan menerapkan kebijakan publik yang mempunyai dampak langsung terhadap interaksi kelembagaan dan manusia. seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi (Tamayao dalam Ikeanyibe, 2017).

Tata kelola menuntut mekanisme pemberian layanan yang didistribusikan melalui desentralisasi dan pembagian wewenang, dengan unit analisis berupa jaringan organisasi nirlaba, sektor swasta, serta berbagai unit dan jenjang pemerintahan lainnya. (Ewalt, 2001). Pada dasarnya, tata kelola melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan tersebut mencakup penduduk setempat, organisasi yang melayani masyarakat/daerah, sektor publik, dan sektor swasta (Gibson, 2011).

Penelitian ini mengacu pada Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik karena Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri merupakan wujud pelaksanaan administrasi publik melalui penyelenggaraan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga sebagai pengelola program publik secara akuntabel, responsif, serta berorientasi pada pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.5.4 Manajemen Publik

Pergeseran paradigma selanjutnya berimplikasi pada kebutuhan pengelolaan program dan sumber daya publik sebagai kerangka operasional dalam pelaksanaannya. Pengelolaan ini melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta inovasi untuk menjawab tantangan modern (Helpiastuti *et al.*, 2025). Manajemen publik merupakan perpaduan dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik (Mc Kevitt & Lawton dalam Sudarmanto *et al.*, 2020).

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) manajemen publik dipahami sebagai tanggung jawab seseorang dalam mengelola dan menjalankan organisasi serta memanfaatkan berbagai sumber daya, baik manusia maupun mesin untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Denhardt & Denhardt (2015), manajemen publik berfokus pada pelayanan kepada warga negara, bukan sekadar pengendalian warga negara. Dengan demikian, tata kelola

publik didasarkan pada kolaborasi, tujuan bersama, dan pemberdayaan masyarakat (Helpiastuti *et al.*, 2025).

Menurut Ott, Hyde dan Shafritz dalam Firdausijah (2023) manajemen publik berfokus pada proses implementasi kebijakan publik oleh organisasi publik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Menurut Nor Ghofur (2014) manajemen publik manajemen publik diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang bertujuan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. (Firdausijah *et al.*, 2022).

Relevansi teori manajemen publik dalam riset ini terletak pada pengelolaan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Manajemen publik sebagai kerangka untuk memahami proses pengelolaan program secara terstruktur khususnya dalam memastikan pelaksanaan program berjalan konsisten. Dalam konteks ini, pengelolaan program menjadi unsur penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi praktik pengelolaan yang dapat dikategorikan sebagai *best practice*. Penerapan prinsip-prinsip manajemen publik akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi pemerintah dalam menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan tercermin dalam pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan dan program pemerintah.

1.5.5 Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya adalah wujud nyata tanggung jawab sebuah organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, yang dijalankan sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan (Sinambela dalam Mustanir, 2022). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh penyedia layanan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun layanan administratif, selaras dengan regulasi yang berlaku (Ismail dalam Hendrayady et al., 2023).

Sementara itu, Mahmudi (2010) memaknai pelayanan publik sebagai beragam bentuk kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara layanan demi memenuhi keperluan publik sesuai ketentuan hukum yang ada (Revida et al., 2021). Pandangan ini senada dengan Kemenpan 63/Kep/M.PAN/7/2003, yang mengartikan pelayanan publik sebagai keseluruhan aktivitas penyelenggara layanan dalam memenuhi kebutuhan penerima layanan sekaligus menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tjandra dalam Hendrayady et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk pemenuhan kebutuhan serta kepentingan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang, jasa, maupun layanan administratif dengan berpedoman aturan yang berlaku. kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau institusi publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat,

berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri mempresentasikan bentuk pelayanan yang berfokus pada dukungan biaya pendidikan dengan menciptakan nilai tambah pelayanan melalui dorongan keberlanjutan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan untuk mengidentifikasi program yang terbukti berhasil, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yang dikenal sebagai *best practice* dalam pelayanan publik.

1.5.6 Best Practice

Menurut Mulgan dan Albury (2003) menjelaskan bahwa inovasi yang berhasil ditunjukkan dari kemampuan suatu proses, produk, jasa, atau metode baru yang diterapkan untuk menghasilkan perbaikan yang berarti dalam efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan. Berdasarkan definisi tersebut, inovasi tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan dan eksekusinya serta harus mampu memberikan dampak pada aspek efisiensi, efektivitas, serta kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (Prasojo *et al.*, 2004).

Sementara itu, UN Habitat (*United Nations Human Settlements Programme*) dalam buku berjudul Reformasi Birokrasi Dalam Praktik: Kasus di Kabupaten Jembrana (Prasojo *et al.*, 2004) menjelaskan bahwa *best practices* dalam konteks pembangunan perkotaan merupakan berbagai inisiatif yang mampu memberikan

kontribusi yang besar dalam mendongkrak taraf kualitas kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Menurut UN Habitat, suatu inisiatif dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila telah terbukti berhasil melalui beberapa karakteristik utama, yaitu menunjukkan dampak yang nyata, terwujud melalui kerja sama berbagai pihak, mampu dipertahankan secara berkelanjutan. Pengkajian terhadap praktik baik dalam pelayanan publik dilakukan dengan pengumpulan data yang berfokus pada aspek: (1) Kondisi yang terjadi di lapangan; (2) respons yang muncul, baik dari penyelenggara maupun masyarakat, baik dari institusi penyelenggara maupun masyarakat; (3) Peningkatan kualitas yang tercapai; (4) Perbaikan sistem yang dihasilkan; dan (5) manfaat yang diperoleh masyarakat dari penerapan praktik baik. (Prasojo *et al.*, 2004).

UN Habitat (*United Nations Human Settlements Programme*) memperkenalkan dan memanfaatkan *best practices* sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik berdasarkan kondisi dan pengamana nyata di lapangan; meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan maupun masyarakat mengenai berbagai alternatif solusi terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi bersama; sarana berbagi serta mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui jaringan kerja sama dan pembelajaran berantai (*peer to peer learning*). Penentuan suatu praktik sebagai *best practice* dilakukan melalui penilaian berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh UN. (Prasojo *et al.*, 2004)

1. Dampak (*impact*), sebuah *best practices* harus mampu menghasilkan perubahan yang positif dan dapat dibuktikan secara nyata terhadap

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan berada dalam kondisi ekonomi lemah.

2. Kemitraan (*partnership*), sebuah *best practices* harus dibangun melalui kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dengan melibatkan dua aktor atau lebih yang berkolaborasi.
3. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah *best practices* harus berkelanjutan yang didukung oleh legislasi yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi dan sumber daya yang dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kepemimpinan (*leadership*), sebuah *best practices* harus didorong dengan pemimpin yang mampu mendorong perubahan dan menggerakkan tindakan melalui komitmen serta keteladanan yang diberikan.
5. Dapat ditransfer (*transferability*), yakni kemampuan suatu inovasi untuk dipelajari dan memberikan manfaat bagi daerah lain melalui proses berbagi pengetahuan sehingga dapat dikembangkan dan direplikasi oleh daerah lain

Suatu praktik pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila didukung oleh berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut berjalan secara optimal. Namun, keberlanjutan praktik baik juga sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung yang perlu diidentifikasi untuk perbaikan program ke depan.

1.5.7 Faktor Pendukung Inovasi Organisasi Pemerintahan

Keberhasilan suatu inovasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas organisasi yang mendukungnya, terutama melalui keberadaan penduduk yang kompeten, kreatif, inovatif, mampu bekerja sama secara efektif, serta memiliki komitmen untuk mempertahankan inovasi pelayanan yang telah dikembangkan. Adapun menurut Doley (dalam Nurmandi, 2014), terdapat lima faktor pendorong yang mempengaruhi inovasi organisasi pemerintahan daerah, yaitu:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam organisasi berkaitan dengan pola arahan pimpinan yang diwujudkan melalui pendelegasian kewenangan sehingga mampu mendorong kerja sama dan perubahan dalam pelaksanaan inovasi program.

2. Strategi dan kinerja

Strategi dalam peningkatan kinerja berkaitan dengan upaya organisasi dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan pengalaman. Strategi dapat berkembang melalui proses pembelajaran dari berbagai kendala dan permasalahan yang muncul sehingga menghasilkan Upaya peningkatan kinerja.

3. Pemberdayaan Kelompok

Pemberdayaan kelompok berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta pentingnya kejelasan dalam mendefinisikan tugas, mengingat organisasi sering memiliki tujuan yang

belum sepenuhnya jelas sehingga perlu dipahami melalui proses pembelajaran dalam pelaksanaan inovasi.

4. Rekayasa dan pembaharuan

Rekayasa dan pembaharuan dalam inovasi organisasi berkaitan dengan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap inovasi yang telah berjalan. Pembaharuan dapat dilakukan melalui pengembangan sistem, pemanfaatan teknologi, maupun perbaikan layanan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pelaksanaan inovasi.

5. Pembelajaran dan komunikasi

Inovasi bergantung pada kemampuan organisasi untuk bertukar informasi dan pengetahuan yang dapat membangun konsensus internal dan eksternal untuk perubahan dalam organisasi.

1.5.8 Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri

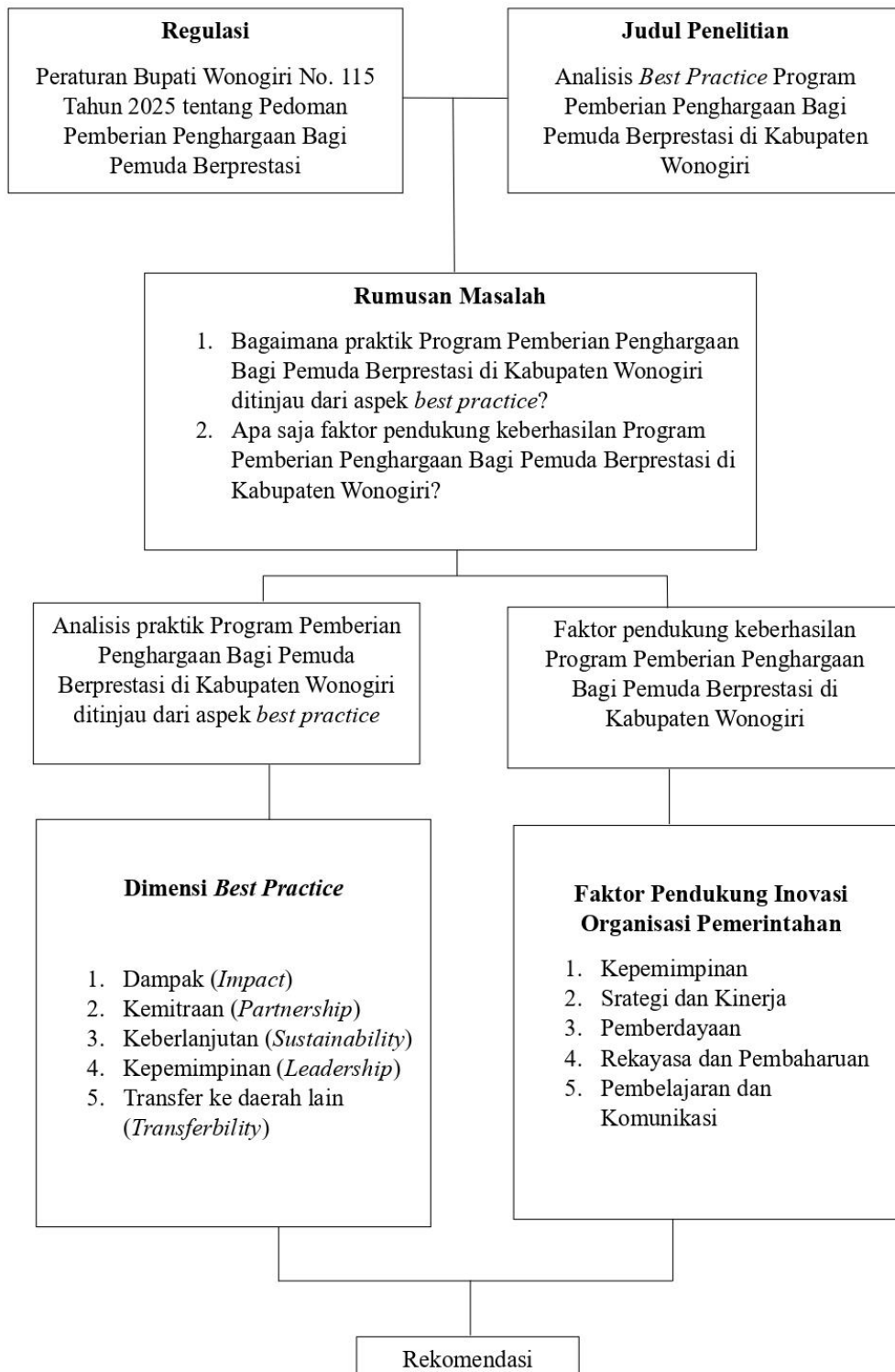
Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi merupakan bantuan biaya pendidikan kuliah untuk mahasiswa terpilih yang berdomisili di Kabupaten Wonogiri. Penerima program adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan dinyatakan lulus seleksi, dengan besaran bantuan Rp12.000.000,00 per tahun untuk mendukung berbagai kebutuhan akademik selama masa studi. (Imapres, 2025). Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM di Wonogiri yang menjadi jalan guna menurunkan angka kemiskinan (Praditia, 2023). Pada tahun 2016-2017, program ini difokuskan bagi hanya mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Namun, mulai tahun 2018 hingga kini, diperluas mencakup

mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi A/unggul. Program ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan Pasal 13 ayat (4) huruf b terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda dapat dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi.

Mengutip dari laman berita *rri.co.id*, Program Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Wonogiri diselenggarakan guna meringankan biaya pendidikan dan menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya mempersiapkan kader masa depan Kabupaten Wonogiri. Program ini telah berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2016 hingga 2024 dengan total dana yang telah disalurkan mencapai Rp 55,087 miliar dan diterima oleh 4.394 mahasiswa. Selain memberikan dukungan finansial, program ini juga untuk mendorong generasi muda agar lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan. Bupati Wonogiri Periode 2016-2024 berharap mahasiswa dapat berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Wonogiri dengan cara mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama masa studi, seperti memberikan edukasi dalam pertemuan posyandu, perencanaan desa, pendampingan, dan monitoring. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pengetahuan baru sehingga dapat meningkatkan taraf sosial di Kabupaten Wonogiri (Yogi, 2024).

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan
<i>Best Practice</i>	Dampak (<i>Impact</i>)	1. Dampak ekonomi 2. Dampak akademik 3. Dampak pembangunan daerah
	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	1. <i>Stakeholder</i> dan peran yang terlibat dalam praktik program
	Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	1. Dukungan legislasi 2. Dukungan Anggaran
	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	1. Komitmen Pimpinan Daerah
	Transfer ke daerah lain (<i>Transferbility</i>)	1. Transfer Pengetahuan 2. Replikasi Inovasi
Faktor Pendukung	Kepemimpinan	1. Pola arahan kepala dinas
	- Strategi - Kinerja	1. Strategi yang berkembang dari praktik pelaksanaan
	Pemberdayaan Kelompok	1. Penguatan Kapasitas SDM
	- Rekayasa - pembaharuan	1. Penyempurnaan Inovasi Program
	- Pembelajaran - Komunikasi	1. Komunikasi antar organisasi 2. Komunikasi kepada masyarakat

1.8 Argumen Penelitian

Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu program di bidang kepemudaan dan pendidikan. Pelaksanaan program ini tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan dukungan biaya pendidikan kepada mahasiswa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas insan daerah serta memperkuat peran pemuda dalam mendukung pembangunan daerah. Program ini diinisiasikan sebagai respons atas rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri yang berada pada posisi terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Subosukowonosraten.

Seiring dengan pelaksanaan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan positif. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Wonogiri pada periode 2020–2024 mengalami peningkatan. Selain itu, Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi juga memperoleh pengakuan melalui penghargaan dalam ajang *Innovative Government Award (IGA)* dan menjadi referensi bagi beberapa daerah lain dalam mengembangkan program sejenis. Program ini tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga menekankan kontribusi sosial penerima penghargaan yang menjadi salah satu komponen utama dalam seleksi lanjutan Capaian tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi kebijakan daerah, tetapi juga memiliki nilai praktik baik (*best practice*) yang berpotensi untuk direplikasi dengan penyesuaian konteks daerah.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian dan kegunaannya. (Sugiyono, 2013:2). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari aspek *Best Practice*.

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berfokus pada penyajian gambaran suatu fenomena secara sistematis berdasarkan data yang akurat (Sahir, 2022). Pendekatan kualitatif berupaya menggali dan menginterpretasikan gejala sosial secara mendalam dengan bertumpu pada data yang bersifat non-angka, mencakup hasil wawancara, pengamatan di lapangan, maupun dokumen-dokumen pendukung (Hasan *et al.*, 2025:4). Jenis penelitian ini sering digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu peristiwa maupun konteks tertentu (Hasan *et al.*, 2025:3).

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian mengacu pada area khusus yang dipilih oleh peneliti sebagai pelaksanaan studi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menetapkan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi yang dijadikan fokus pengumpulan data dan analisis.

1.9.3. Subjek Penelitian

Sumber informasi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dapat berupa individu, benda, maupun organisme yang dalam metodologi penelitian disebut sebagai subjek penelitian (Idrus dalam Rahmadi, 2011:61). Apabila subjek penelitian dalam penelitian kualitatif berupa orang, maka subjek tersebut dikenal dengan istilah informan.

Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Rahmadi (2011:65) menjelaskan bahwa teknik *purposive* karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, terutama individu yang dianggap memahami secara mendalam suatu peristiwa atau memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah:

1. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri.
2. Pengawas Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) Kabupaten Wonogiri.
3. Mahasiswa penerima Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri

Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri dipilih karena bertanggung jawab atas keseluruhan program dan terlibat langsung dalam aspek teknis dan administratif pelaksanaan Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi. Selain itu, Pengawas Ikatan Mahasiswa Berprestasi

(Imapres) Kabupaten Wonogiri dipilih sebagai informan karena berperan langsung dalam pengelolaan teknis Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi, khususnya pada Sistem Seleksi Pemuda Berprestasi (Simapres) serta koordinasi teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi atau Lembaga Eksternal terkait program kerja. Mahasiswa penerima program dipilih karena subjek utama kebijakan yang dapat memberikan penilaian atas manfaat program serta menggambarkan keterlibatan mereka dalam menjalankan peran sosial yang diharapkan pemerintah terdiri dari 2 mahasiswa. Total keseluruhan informan dalam penelitian ini terdiri 4 orang.

1.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik, kualitas, sifat, serta atribut yang terdapat pada objek, fenomena, maupun subjek yang menjadi fokus penelitian (Hasan et al., 2025:32–33). (Hasan et al., 2025:32-33).

1.9.5. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data untuk mendukung hasil penelitian:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber informasi utama selama proses penelitian berlangsung (Sulung et al., 2024). Pada penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berfungsi sebagai bahan utama dalam analisis penelitian

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang tidak dihimpun sendiri oleh peneliti, melainkan sumber perantara (Sulung *et al.*, 2024). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Imapres Wonogiri, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri, laporan BPS dan sumber berita *online* dan dianalisis oleh peneliti untuk melengkapi data primer. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam proses analisis.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Ketepatan teknik pengumpulan data dan validitas instrumen penelitian menjadi faktor penting dalam menghasilkan data penelitian yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan (Jailani *et al.*, 2023). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti serta memperoleh informasi yang dibutuhkan dari informan (Sugiyono, 2013:130). Adapun yang dijadikan informan oleh peneliti adalah Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri dan mahasiswa penerima Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri, dan masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap partisipan dan kondisi yang terkait dengan objek penelitian. (Jailani *et al.*, 2023). Dalam teknik observasi, data diperoleh melalui proses pengamatan langsung terhadap berbagai fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat dan mencatat kondisi yang berlangsung secara alami tanpa adanya campur tangan dari peneliti. (Wani dalam Romdona, 2025). Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap tahapan pendaftaran, sosialisasi, dan proses seleksi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai dokumen, antara lain catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapor, leger, serta dokumen pendukung lainnya. (Arikunto dalam Abdussamad, 2021:150).

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman, proses pengolahan data kualitatif bersifat interaktif dan dijalankan secara berkesinambungan hingga tercapai titik kejenuhan data. Kegiatan dalam analisis data terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saleh, 2023).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data dilakukan melalui kegiatan merangkum dan menyeleksi data yang dianggap penting, kemudian memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan serta menemukan tema dan pola yang muncul. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah tahapan analisis berikutnya (Saleh, 2023).

2. Penyajian Data

Pemaparan data dapat dituangkan dalam aneka bentuk, mulai dari uraian penjelasan, diagram, keterkaitan antar kategori dalam berbagai format, antara lain uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Peneliti akan lebih mudah memahami kondisi yang terjadi sekaligus menyusun rencana tindakan pada tahap selanjutnya melalui penyajian data. Penyajian data tidak terbatas pada narasi tertulis, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan kerja, maupun *chart* (Abdussamad, 2021). Penyajian data merupakan proses menampilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis dalam bentuk uraian tertulis berdasarkan fakta-fakta yang saling berhubungan. Tampilan data (*data display*) berfungsi untuk membantu peneliti memahami fenomena yang terjadi sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rukin, 2019:90).

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi terhadap data yang telah diolah dan disusun ke dalam bentuk yang sesuai

dengan pola penyelesaian permasalahan penelitian. (pahleviannur et al., 2022:31).

1.9.8. Kualitas Data

Triangulasi dapat dipahami sebagai teknik yang digunakan untuk memperoleh data sekaligus memastikan keabsahannya dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber informasi. (Abdussamad, 2021:156). Terdapat tiga jenis triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Metode ini dimaksudkan untuk menguji kredibilitas data melalui proses pemeriksaan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda guna memastikan kesesuaiannya.

2. Triangulasi Teknik

Keabsahan data dalam metode ini diverifikasi dengan cara membandingkan informasi yang bersumber dari narasumber yang sama namun diperoleh melalui teknik pengumpulan yang beragam.

3. Triangulasi Waktu

Pendekatan ini digunakan untuk memverifikasi keabsahan data melalui pengecekan ulang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu serta kondisi yang berlainan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan data yang berasal dari berbagai sumber sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kredibel dan akurat, seperti pihak

Disporapar Kabupaten Wonogiri, Imapres, dan penerima program. Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.